

ABSTRAK

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DITPOLAIR POLDA LAMPUNG TERHADAP KEJAHATAN MENANGKAP IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK

Oleh

DINDA SAPUTRA

Penyebab laju kerusakan lingkungan laut di Provinsi Lampung adalah tindakan *illegal fishing*. Salah satu bentuk tindakan *illegal fishing* yang memiliki dampak yang sangat besar dan jumlah kasusnya cukup banyak adalah pengeboman ikan. Penggunaan bom ikan di perairan Lampung tentunya dapat mengancam kelestarian suberdaya dan merusak lingkungan di laut, khususnya terumbu karang yang semestinya dapat memberikan manfaat, dan mungkin tidak dapat pulih kembali. Tindakan pengeboman ikan merupakan tindakan kriminalitas dan melanggar hukum karena para pelaku dapat dikenakan pasal 1 ayat (1) Undang-undang darurat No.12 1951 tentang bahan peledak. Dalam hal ini, lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan penindakan hukum adalah Ditpolair Polda Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan pengawasan dan kendala-kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pengawasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Ditpolair Polda Lampung terhadap kejahatan menangkap ikan dengan bahan peledak telah berjalan efektif karena pengawasan yang diterapkan telah dapat dipahami sifat dan kegunaannya, pengawasannya mengikuti pola organisasi, pengawasan yang dapat mengidentifikasi masalah organisasi, pengawasannya bersifat fleksibel dan ekonomis. Kendala – kendala yang dihadapi saat pelaksanaan penngawasan yaitu rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat, sosial ekonomi, ..pengaduan masyarakat. Maka dari itu, perlu meningkatkan intensitas patroli, meningkatkan sosialisasi, dan menjalin kerjasama dengan pihak yang terkait.

Kata kunci : Ditpolair Polda Lampung, Pengawasan, Pengeboman ikan.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF CONTROL FUNCTIONS DITPOLAIR POLDA LAMPUNG AGAINST CRIMINAL FISHING CRIMES WITH EXPLOSIVE MATERIALS

By

DINDA SAPUTRA

The cause of the rate of damage to the marine environment in Lampung Province is illegal fishing. One form of illegal fishing action that has a huge impact and the number of cases is quite a lot of fish bombing. The use of fish bombs in the waters of Lampung can certainly threaten the sustainability of resources and damage the environment at sea, especially coral reefs that should be able to provide benefits, and may not be able to recover. Fish bombing action is criminal and illegal because the perpetrators may be subject to article 1 paragraph (1) of the Emergency Act No.121951 on explosives. In this case, the institution authorized to conduct supervision and legal action is Ditpolair Polda Lampung. The type of this research is descriptive research with qualitative approach. Data collection techniques through interviews and documentation. This research is focused on the implementation of supervision and constraints faced during the implementation of supervision.

The results of this study indicate that the implementation of supervision function Ditpolair Polda Lampung against the crime of fishing with explosives has been running effectively because the supervision applied has been understood the nature and usefulness, supervision follows the pattern of the organization. supervision that can identify organizational problems, its supervision is flexible and economical. Constraints - constraints faced during the implementation of supervision is the low level of understanding and public awareness, social economic and public complaints. Therefore, need to increase patrol intensity, improve socialization, and establish cooperation with related parties.

Keywords: Ditpolair polda lampung, supervision, fish bombing.